

## BAB 5

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, dilakukan beberapa macam analisis, yaitu analisis angka pengganda, analisis keterkaitan antar sektor, dan analisis dampak pengeluaran pemerintah terhadap distribusi pendapatan dan kesempatan kerja. Untuk melakukan analisis digunakan dua pendekatan yaitu model input-output biasa dan model Miyazawa.

#### **5.1 Analisis Angka Pengganda (*Multiplier Analysis*)**

Analisis angka pengganda dilakukan untuk melihat pengaruh perubahan permintaan akhir pada suatu sektor terhadap variabel-variabel endogen. Ada 3 (tiga) jenis analisis angka pengganda yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu analisis angka pengganda output (*output multiplier*), analisis angka pengganda pendapatan (*income multiplier*), dan analisis angka pengganda tenaga kerja (*labor multiplier*).

##### **5.1.1 Angka Pengganda Output (*Output Multiplier*)**

Dengan menggunakan analisis angka pengganda output pada tabel input output biasa, diperoleh hasil bahwa nilai pengganda output yang tertinggi terdapat pada sektor Listrik dan Air Bersih yaitu sebesar 2,131 (Tabel 5.1). Peringkat kedua sampai dengan kelima tertinggi berikutnya berturut-turut adalah sektor Industri Makanan dan Minuman, sektor Industri Non Makanan dan Minuman, sektor Jasa Hiburan dan Kebudayaan, serta sektor Angkutan Laut, sedangkan sektor yang memiliki nilai pengganda output yang terendah adalah sektor Pemerintahan Umum dan Pertahanan yang nilainya sebesar 1,0. Empat sektor lainnya yang memiliki nilai pengganda output terendah berturut-turut dari yang terendah adalah sektor Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan, sektor Perikanan, sektor Usaha Persewaan Bangunan dan Jasa Perusahaan, serta sektor Pertambangan dan Penggalan. Pengertian dari angka-angka nilai pengganda output ini adalah apabila terjadi perubahan atau penambahan satu

rupiah permintaan akhir sektor tersebut maka terjadi penambahan output total di perekonomian sebesar nilai pengganda outputnya.

Tabel 5.1 Angka Pengganda Output Beberapa Sektor Terpilih Di Provinsi Sulawesi Tengah

Peringkat	Pengganda Output Tipe I		Pengganda Output Tipe Miyazawa	
	Sektor	Nilai	Sektor	Nilai
1	Listrik dan Air Bersih	2,13	Pemerintahan dan Pertahanan	4,49
2	Industri Makanan	1,93	Listrik dan Air Bersih	3,51
3	Industri Non Makanan	1,93	Js. Kemasyarakatan	3,44
4	Jasa Hiburan dan Kebudayaan	1,91	Bangunan/Konstruksi	3,28
5	Angkutan Laut	1,89	Hotel	3,23
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
18	Pertambangan	1,22	Komunikasi	2,14
19	Perswn Bangunan & Js. Pershn	1,21	Pertanian	2,02
20	Perikanan	1,19	Kehutanan	1,98
21	Pertanian	1,16	Perikanan	1,98
22	Pemerintahan dan Pertahanan	1,00	Perswn Bangunan & Js. Pershn	1,91

Sumber: Lampiran 5

Berbeda dengan hasil yang ditampilkan oleh tipe I, pengganda output yang dihasilkan oleh tipe Miyazawa menempatkan sektor Pemerintahan Umum dan Pertahanan sebagai sektor yang paling besar angka pengganda outputnya. Padahal, pada tipe I sektor ini memiliki nilai pengganda output yang paling kecil. Hal ini dapat disimpulkan bahwa masuknya rumah tangga sebagai salah satu sektor yang endogen dalam perekonomian (*induced effect*), memiliki pengaruh yang kuat dalam menciptakan output bagi sektor Pemerintahan Umum dan Pertahanan. Rumah tangga di Sulawesi Tengah memiliki kaitan yang erat dengan urusan pemerintahan dan pertahanan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya anggota rumah tangga yang berpartisipasi di sektor Pemerintahan Umum dan Pertahanan, sebab jika dilihat pada tabel transaksi input output (Model Miyazawa), ternyata input untuk sektor ini seluruhnya berasal dari sektor Rumah Tangga (sektor 23 dan 25). Sektor lainnya yang juga mengalami peningkatan nilai dampak output yang cukup

besar akibat adanya *induced effect* adalah sektor Jasa Pendidikan, Kesehatan, dan Jasa Sosial Kemasyarakatan serta sektor Jasa Perorangan dan Rumah Tangga.

Jika tujuan yang ingin dicapai adalah memaksimalkan dampak terhadap output sektor-sektor produksi dalam perekonomian, maka tambahan permintaan akhir harus dialokasikan sepenuhnya ke sektor dengan nilai pengganda output tertinggi. Akan tetapi hal ini tidaklah layak dalam pengambilan suatu kebijakan karena banyak hal lain yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam mengambil suatu keputusan. Tidak boleh terjadi interpretasi yang terlalu berlebihan terhadap nilai angka pengganda ini, karena keterbatasan yang dimiliki oleh analisis input output.

### **5.1.2 Angka Pengganda Pendapatan (*Income Multiplier*)**

Berdasarkan penghitungan angka pengganda pendapatan dengan model input-output terbuka (tipe I), diketahui bahwa sektor Industri Makanan dan Minuman merupakan sektor yang mempunyai angka pengganda pendapatan yang terbesar yaitu sebesar 3,301. Hal ini berarti bahwa untuk setiap perubahan/peningkatan satu rupiah permintaan akhir sektor Industri Makanan dan Minuman akan meningkatkan pendapatan rumah tangga total dalam perekonomian Sulawesi Tengah sebesar nilai pengganda pendapatan tersebut. Beberapa sektor lainnya yang memiliki nilai pengganda pendapatan tipe I yang besar berturut-turut dari yang nilainya terbesar adalah sektor Restoran, sektor Jasa Hiburan dan Kebudayaan, sektor Industri Non Makanan dan Minuman, serta sektor Listrik dan Air Bersih. Nilai pengganda pendapatan tipe I yang terkecil dimiliki oleh sektor Pemerintahan Umum dan Pertahanan (1,000), kemudian diikuti oleh sektor Jasa Perorangan dan Rumah Tangga, sektor Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, sektor Jasa Pendidikan, Kesehatan dan Jasa Sosial Kemasyarakatan Lainnya, serta sektor Pertambangan dan Penggalian. Nilai pengganda pendapatan untuk masing-masing sektor berdasarkan beberapa tipe (tipe I, tipe II, dan tipe Miyazawa dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Berbeda dengan pengganda pendapatan tipe I yang merupakan hasil dari analisis pada tabel input-output terbuka, pengganda pendapatan tipe II dan tipe

Miyazawa diperoleh dari hasil analisis pada tabel input output tertutup. Dalam tabel input-output tertutup, rumah tangga dimasukkan sebagai salah satu sektor produksi sehingga dianggap sebagai faktor yang endogen dan turut menentukan besaran output perekonomian. Tidak terdapat perbedaan signifikan pada sektor-sektor dalam nilai pengganda pendapatan antara tipe II dan tipe Miyazawa, hal ini dikarenakan memang pada dasarnya kedua tipe pengganda pendapatan ini adalah sama yaitu memasukkan rumah tangga sebagai variabel yang endogen, hanya saja bedanya pada tipe Miyazawa, sektor rumah tangga tersebut dibagi menjadi tiga kelompok pendapatan.

Angka pengganda pendapatan tipe I selalu lebih kecil bila dibandingkan dengan angka pengganda pendapatan tipe II untuk sektor yang sama. Hal ini diakibatkan oleh adanya *induced effect* yang muncul dalam analisis akibat masuknya rumah tangga sebagai salah satu sektor produksi dalam perekonomian Sulawesi Tengah.

Tabel 5.2 Angka Pengganda Pendapatan Beberapa Sektor Terpilih Di Provinsi Sulawesi Tengah

Peringkat	Pengganda Pendapatan					
	Type I		Type II		Type Miyazawa	
	Sektor	Nilai	Sektor	Nilai	Sektor	Nilai
1	Industri Makanan	3,30	Industri Makanan	4,60	Industri Makanan	4,60
2	Restoran	2,58	Restoran	3,59	Restoran	3,59
3	Jasa Hiburan & Kebdyn	2,33	Jasa Hiburan & Kebdyn	3,25	Jasa Hiburan & Kebdyn	3,25
4	Industri Non Makanan	2,17	Industri Non Makanan	3,03	Industri Non Makanan	3,03
5	Listrik & Air Bersih	1,99	Listrik & Air Bersih	2,77	Listrik & Air Bersih	2,76
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
18	Pertambangan	1,17	Pertambangan	1,63	Pertambangan	1,63
19	Jasa Kemasyarakatan	1,17	Jasa Kemasyarakatan	1,63	Jasa Kemasyarakatan	1,63
20	Pertanian	1,15	Pertanian	1,60	Pertanian	1,60
21	Jasa Perorangan RT	1,12	Jasa Perorangan RT	1,56	Jasa Perorangan RT	1,56
22	Pemerintahan	1,00	Pemerintahan	1,39	Pemerintahan	1,39

Sumber: Lampiran 6

Pengganda pendapatan tipe II dapat memberikan gambaran besaran yang lebih baik tentang potensi penciptaan pendapatan rumah tangga dibanding pengganda pendapatan tipe I. Namun, walaupun besaran angkanya berbeda tetapi urutan sektor-sektor yang memiliki nilai pengganda dari yang tertinggi sampai terendah pada kedua tipe pengganda ini adalah sama, demikian pula dengan pengganda tipe Miyazawa.

Apabila dibandingkan hasil analisis angka pengganda pendapatan ini dengan analisis angka pengganda output, terlihat bahwa sektor-sektor unggulan (memiliki angka pengganda yang besar) pada kedua jenis analisis ini memiliki kemiripan, kecuali sektor Restoran yang pada analisis pengganda pendapatan berada pada urutan kedua tertinggi, tetapi dalam analisis pengganda output tidak masuk dalam lima besar yang tertinggi angka pengganda outputnya. Artinya adalah bahwa sektor Restoran walaupun memiliki sedikit potensi penciptaan output akibat peningkatan permintaannya, tetapi mampu menciptakan potensi pendapatan rumah tangga yang tinggi, hal ini disebabkan karena sektor ini lebih banyak menggunakan input yang berasal dari rumah tangga atau dengan kata lain sektor ini banyak menyerap tenaga kerja rumah tangga.

### **5.1.3 Angka Pengganda Tenaga Kerja (*Labor Multiplier*)**

Berdasarkan penghitungan angka pengganda tenaga kerja dengan model input-output terbuka (tipe I), diketahui bahwa sektor Restoran merupakan sektor yang mempunyai angka pengganda tenaga kerja yang terbesar. Beberapa sektor lainnya yang memiliki nilai pengganda tenaga kerja tipe I yang besar berturut-turut dari yang nilainya terbesar adalah sektor Industri Makanan dan Minuman, sektor Angkutan Udara, sektor Listrik dan Air Bersih, serta sektor Industri Non Makanan dan Minuman. Sementara itu nilai pengganda tenaga kerja tipe I yang terkecil dimiliki oleh sektor Pemerintahan Umum dan Pertahanan, kemudian diikuti oleh sektor Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, sektor Perdagangan, sektor Jasa Penunjang Angkutan dan Pergudangan, serta sektor Jasa Hiburan dan Kebudayaan. Nilai pengganda tenaga kerja untuk masing-masing sektor berdasarkan beberapa tipe (tipe I, tipe II, dan tipe Miyazawa) dapat dilihat pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3 Angka Pengganda Tenaga Kerja Beberapa Sektor Terpilih Di Provinsi Sulawesi Tengah

Peningkat	Pengganda Tenaga Kerja					
	Type I		Type II		Type Miyazawa	
	Sektor	Nilai	Sektor	Nilai	Sektor	Nilai
1	Restoran	51,18	Restoran	77,67	Restoran	78,60
2	Industri Makanan	14,92	Angkt. Udara	28,39	Angkt. Udara	28,27
3	Angkt. Udara	13,49	Industri Makanan	19,17	Industri Makanan	19,31
4	Listrik & Air Bersih	4,73	Listrik & Air Bersih	10,62	Listrik & Air Bersih	10,87
5	Industri Non Makanan	2,81	Bank & Lemb.Keu	9,54	Bank & Lemb.Keu	9,63
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
18	Js. Hiburan&Kebudayaan	1,12	Jasa Kemasyarakatan	1,52	Jasa Kemasyarakatan	1,54
19	Js.Angkt.& Pergudgan	1,10	Perdagangan	1,48	Perdagangan	1,48
20	Perdagangan	1,10	Js.Angkt.& Pergudgan	1,31	Js.Angkt.& Pergudgan	1,32
21	Pertanian	1,08	Pertanian	1,28	Pertanian	1,29
22	Pemerintahan	1,00	Js. Hiburan&Kebudayaan	1,16	Js. Hiburan&Kebudayaan	1,17

Sumber: Lampiran 7

Dari hasil analisis angka pengganda tenaga kerja ini, diperoleh gambaran bahwa sektor-sektor yang memiliki nilai pengganda yang besar merupakan sektor-sektor yang banyak menyerap tenaga kerja, terutama bagi sektor-sektor yang tidak memiliki nilai pengganda output yang besar tetapi memiliki nilai pengganda tenaga kerja yang besar. Sektor yang masuk kategori ini adalah sektor Restoran, sektor Angkutan Udara dan sektor Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Sementara itu sektor-sektor yang padat modal dapat dilihat dari tingginya nilai pengganda output sektor ini tetapi nilai pengganda tenaga kerjanya rendah. Contoh sektor yang padat modal di Sulawesi Tengah ini adalah sektor Jasa Hiburan dan Kebudayaan, serta sektor Angkutan Laut.

Sektor Industri Makanan dan Minuman, sektor Industri Non Makanan dan Minuman, serta sektor Listrik dan Air Bersih memiliki nilai pengganda tenaga kerja yang besar karena pengganda outputnya juga besar, berbeda dengan sektor Restoran yang memiliki nilai pengganda tenaga kerja yang besar tetapi nilai pengganda outputnya tergolong kecil. Oleh sebab itu, kebijakan publik yang

mengutamakan penciptaan lapangan pekerjaan seharusnya difokuskan pada pengembangan sektor Restoran yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah.

## 5.2 Analisis Keterkaitan Antar Sektor

Pertimbangan mengenai hubungan atau keterkaitan seluruh sektor ekonomi dalam menggerakkan suatu perekonomian pada suatu wilayah tertentu sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan terhadap pengembangan suatu sektor. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat hubungan atau keterkaitan antar sektor ekonomi dalam suatu perekonomian digunakan analisis keterkaitan antar sektor. Keterkaitan tersebut terdiri dari dua macam hubungan yaitu keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) dan keterkaitan ke depan (*forward linkage*).

Keterkaitan ke belakang (BL) merupakan hubungan antara sektor yang bersangkutan dengan input atau bahan mentah sedangkan keterkaitan ke depan (FL) merupakan hubungan antara sektor yang bersangkutan dengan output atau penjualan. Indikasi bahwa suatu sektor memiliki keterkaitan ke belakang yang tinggi apabila nilai indeks keterkaitan ke belakangnya (BL)  $>1$ , demikian pula indikasi bahwa suatu sektor memiliki keterkaitan ke depan yang tinggi apabila nilai indeks keterkaitan ke depannya (FL)  $>1$ .

Berdasarkan gambaran hasil analisis keterkaitan pada sektor-sektor ekonomi seperti yang terlihat pada Tabel 5.4, terlihat bahwa hasil analisis dengan menggunakan tabel input-output diperoleh nilai indeks BL tertinggi terdapat pada sektor Listrik dan Air Bersih. Sektor yang memiliki nilai BL tertinggi berikutnya berturut-turut adalah sektor Industri Makanan dan Minuman, sektor Industri Non Makanan dan Minuman, sektor Jasa Hiburan dan Kebudayaan, serta sektor Angkutan Laut. Kelima sektor di atas dapat dikategorikan sebagai sektor-sektor hilir dalam perekonomian Sulawesi Tengah karena memiliki indeks BL yang relatif besar. Sektor hilir yang dimaksud adalah sektor yang banyak menggunakan input yang berasal dari output sektor-sektor lainnya.

Selain itu, sektor-sektor yang memiliki indeks BL yang tergolong kecil secara berturut-turut dari yang terkecil adalah sektor Pemerintahan Umum dan Pertahanan, sektor Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan, sektor Perikanan,

sektor Usaha Persewaan Bangunan dan Jasa Perusahaan, sektor Pertambangan dan Pengalihan. Kelima sektor ini bisa dikategorikan sebagai sektor hulu dalam perekonomian Sulawesi Tengah karena kontribusi input primer pada sektor-sektor ini relatif lebih besar daripada kontribusi input antaranya.

Tabel 5.4 Indeks Keterkaitan Ke Belakang (BL) dan Ke Depan (FL) Beberapa Sektor Terpilih Di Provinsi Sulawesi Tengah

Peringkat	Indeks Keterkaitan ke Belakang (BL) dan Keterkaitan ke Depan (FL)							
	Tabel Input Output				Tabel Miyazawa			
	Sektor	BL	Sektor	FL	Sektor	BL	Sektor	FL
1	Listrik/Air Bersih	1,37	Ind. Non Mknan	3,22	Pemerintahan	1,55	Ind. Non Mknan	2,86
2	Industri Makanan	1,25	Kehutanan	1,43	Listrik/Air Bersih	1,21	Pertanian	2,39
3	Ind. Non Mknan	1,24	Pertanian	1,37	Js.Kemasyrktan	1,19	Industri Makanan	2,10
4	Js. Hibrn./Kebudy.	1,23	Perdagangan	1,17	Bangunan/Konst.	1,14	Perdagangan	1,31
5	Angkt. Laut	1,22	Listrik/Air Bersih	1,13	Hotel	1,12	Kehutanan	1,03
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
18	Pertambangan	0,79	Js.Kemasyrktan	0,70	Komunikasi	0,74	Js.Angkt./Pergudgan	0,45
19	Prswn Bgn/Js.Prshn	0,78	Restoran	0,70	Pertanian	0,70	Bangunan/Konst.	0,44
20	Perikanan	0,77	Angkt. Udara	0,70	Kehutanan	0,68	Js. Hibrn./Kebudy.	0,38
21	Pertanian	0,75	Hotel	0,65	Perikanan	0,68	Hotel	0,36
22	Pemerintahan	0,64	Pemerintahan	0,64	Prswn Bgn/Js.Prshn	0,66	Pemerintahan	0,35

Sumber: Lampiran 5

Sektor-sektor yang memiliki indeks FL yang besar berturut-turut dari yang tertinggi adalah sektor Industri Non Makanan dan Minuman, sektor Kehutanan, sektor Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, sektor Perdagangan, serta sektor Listrik dan Air Bersih. Nilai FL yang besar dari sektor-sektor ini mengandung arti bahwa output yang dihasilkan oleh sektor-sektor ini dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya relatif lebih banyak diserap oleh sektor-sektor perekonomian lainnya untuk digunakan sebagai input antara.

Adapun sektor-sektor yang memiliki indeks FL yang tergolong rendah berturut-turut dari yang terendah adalah sektor Pemerintahan Umum dan Pertahanan, sektor Hotel, sektor Angkutan Udara, sektor Restoran, serta sektor Jasa Pendidikan, Kesehatan dan Jasa Sosial Kemasyarakatan. Nilai FL yang

rendah dari sektor-sektor ini mengandung arti bahwa output yang dihasilkan oleh sektor-sektor ini dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya, relatif lebih banyak digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir dalam perekonomian Sulawesi Tengah.

Apabila dilihat secara keseluruhan berdasarkan analisis keterkaitan pada tabel input, terlihat bahwa sektor yang memiliki indeks yang besar baik pada indeks BL maupun FL adalah sektor Listrik dan Air Bersih serta sektor Industri Non Makanan dan Minuman. Berdasarkan gambaran ini dapat disimpulkan bahwa hasil analisis keterkaitan antar sektor di perekonomian Sulawesi Tengah menempatkan kedua sektor di atas sebagai sektor unggulan. Sedangkan sektor yang memiliki indeks BL maupun FL yang rendah adalah sektor Pemerintahan Umum dan Pertahanan. Hal tersebut memiliki arti bahwa sektor ini porsi penggunaan input primernya cukup tinggi dan outputnya kebanyakan langsung dikonsumsi sebagai permintaan akhir.

Dalam hasil analisis keterkaitan antar sektor pada tabel Miyazawa terdapat perbedaan apabila dibandingkan dengan analisis keterkaitan pada tabel input-output biasa. Dengan menggunakan model tabel Miyazawa, diperoleh hasil bahwa lima besar sektor yang memiliki indeks BL tertinggi selain dari sektor Rumah Tangga yang dianggap sebagai faktor endogen adalah sektor Pemerintahan Umum dan Pertahanan, sektor Listrik dan Air Bersih, sektor Jasa Pendidikan, Kesehatan dan Jasa Sosial Kemasyarakatan, sektor Bangunan dan Konstruksi, serta sektor Hotel. Sedangkan pada sektor-sektor yang memiliki indeks FL yang tinggi, tidak banyak terjadi perubahan urutan ranking dimana lima besar indeks tertinggi adalah sektor Industri Non Makanan dan Minuman, sektor Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan, sektor Industri Makanan dan Minuman, sektor Perdagangan, serta sektor Kehutanan.

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan memasukkan sektor Rumah Tangga yang telah dibagi menjadi tiga kelompok pendapatan ke dalam perekonomian sebagai faktor yang endogen, akan menyebabkan perubahan struktur produksi sektor-sektor dalam perekonomian Sulawesi Tengah. Tingginya indeks BL (dalam tabel Miyazawa) pada sektor Pemerintahan Umum dan

Pertahanan, sektor Jasa Pendidikan, Kesehatan dan Jasa Sosial Kemasyarakatan, sektor Bangunan, serta sektor Hotel dapat menjelaskan bahwa sektor-sektor tersebut banyak menggunakan input yang berasal dari sektor Rumah Tangga.

Secara keseluruhan bila dibandingkan sektor-sektor unggulan dari kedua macam model ini (tabel input-output dan tabel Miyazawa), terdapat persamaan pada salah satu sektor unggulan yaitu sektor Industri Non Makanan dan Minuman. Pada analisis keterkaitan dengan menggunakan tabel Miyazawa, sektor ini memiliki nilai  $BL > 1$  dan juga nilai  $FL > 1$ . Adapun sektor unggulan lainnya adalah sektor Industri Makanan dan Minuman.

### **5.3 Analisis Dampak Pengeluaran Pemerintah**

Pada sub bab ini, akan dilakukan analisis hasil dari penghitungan dampak pengeluaran pemerintah terhadap distribusi pendapatan dan penyerapan tenaga kerja. Dalam kedua analisis ini digunakan pendekatan model tabel Miyazawa.

Analisis tersebut didasarkan pada data alokasi anggaran pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2011 yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Tengah tahun 2006-2011. Dari data alokasi anggaran berdasarkan tiap-tiap kegiatan ini kemudian dilakukan pengelompokan berbagai kegiatan ke dalam sektor-sektor (22 sektor) yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah.

Dari hasil pengelompokan diketahui bahwa terdapat enam sektor yang diinjeksi oleh pengeluaran pemerintah bidang kebudayaan dan pariwisata di tahun 2011. Keenam sektor tersebut adalah sektor Bangunan/Konstruksi (15%), sektor Hotel (3%), sektor Restoran (3%), sektor Usaha Persewaan Bangunan dan Jasa Perusahaan (19%), sektor Pemerintahan Umum dan Pertahanan (34%), serta sektor Jasa Hiburan dan Kebudayaan (26%). Persentase pengeluaran pemerintah pada masing-masing sektor ini diasumsikan mewakili gambaran dari persentase alokasi pengeluaran pemerintah bidang kebudayaan dan pariwisata untuk seluruh pemerintahan baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota di Sulawesi Tengah.

Alokasi anggaran pemerintah daerah bidang kebudayaan dan pariwisata belum sepenuhnya sejalan dengan garis besar arah kebijakan pembangunan bidang pariwisata yang ditetapkan oleh pemerintah daerah seperti yang telah disebutkan pada bab sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari masih besarnya bagian anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat administratif (34 persen), sehingga dampaknya terhadap pendapatan masyarakat sebagian besar diterima oleh kelompok pendapatan tinggi yang banyak bekerja di sektor pemerintahan.

Selain itu, untuk melihat sejauh mana pengaruhnya terhadap distribusi pendapatan dan kesempatan kerja, perlu untuk melihat lebih jauh pada tahap implementasi yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan-kegiatannya. Kegiatan-kegiatan yang merupakan implementasi dari program pemasaran pariwisata, pengelolaan kekayaan budaya dan pengembangan destinasi unggulan belum banyak menyentuh kelompok masyarakat berpendapatan rendah karena pelaksanaannya melibatkan jasa perusahaan.

Tabel 5.5 Alokasi Pengeluaran Pemerintah Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011

Keterangan Sektor		Persentase Alokasi (%)	Nilai Alokasi (Rp)
8	Bangunan/Konstruksi	15	6.937.903.500
10	Restoran	3	1.387.580.700
11	Hotel	3	1.387.580.700
18	Usaha Persewaan Bangunan dan Jasa Perusahaan	19	8.788.011.100
19	Pemerintahan Umum dan Pertahanan	34	15.725.914.600
21	Jasa Hiburan dan Kebudayaan	26	12.025.699.400
Jumlah Total		100	46.252.690.000

Sumber: 1. Bank Indonesia (telah diolah kembali)  
2. Renstra Dinas Budpar Sulteng (telah diolah kembali)

Berdasarkan hasil perhitungan selama periode tahun 2001 hingga 2009, rata-rata pertumbuhan pengeluaran pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tumbuh sebesar 6,1% per tahun. Jika diasumsikan bahwa pertumbuhan pengeluaran pemerintah bidang kebudayaan dan pariwisata juga tumbuh sebesar 6,1% per tahun, maka pada tahun 2011 jumlah pengeluaran pemerintah bidang kebudayaan

dan pariwisata diperkirakan akan mencapai nilai Rp. 46.252.690.000. Tabel 5.5 menunjukkan perkiraan alokasi pengeluaran pemerintah bidang kebudayaan dan pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2011.

Selanjutnya, berdasarkan alokasi pengeluaran pemerintah seperti yang terdapat pada Tabel 5.5, dilakukan analisis dampak pengeluaran pemerintah tersebut terhadap penyerapan tenaga kerja dan distribusi pendapatan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan model tabel Miyazawa.

### 5.3.1 Analisis Dampak Pengeluaran Pemerintah Terhadap Distribusi Pendapatan

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen dari permintaan akhir dalam suatu sistem perekonomian, dimana jika terjadi perubahan dalam komponen akhir akan menimbulkan dampak terhadap pendapatan di berbagai sektor ekonomi seperti yang telah dibahas di bab sebelumnya. Dalam sub bab ini akan dilakukan analisis dampak dari pengeluaran pemerintah bidang pariwisata dan kebudayaan terhadap distribusi pendapatan pada masing-masing kelompok pendapatan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 5.6 Dampak Pengeluaran Pemerintah Terhadap Distribusi Pendapatan Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011

Kelompok Pendapatan	Income (Juta Rupiah)			Dampak Income (%)
	Awal	Dampak	Akhir	
Rendah	1.427.527	6.657	1.434.184	25
Sedang	2.318.253	9.004	2.327.258	34
Tinggi	2.056.885	10.752	2.067.637	41
Total	5.802.666	26.413	5.829.079	

Sumber: Lampiran 9

Dari hasil analisis seperti yang terangkum pada Tabel 5.6, diketahui bahwa pemerintah melalui pengeluarannya di bidang pariwisata dan kebudayaan menyebabkan peningkatan pendapatan total sebesar Rp. 26.413.000.000. Dari nilai total tersebut jumlah peningkatan terbesar berada pada kelompok pendapatan tinggi yaitu sebesar Rp. 10.752.000.000, disusul kelompok sedang sebesar Rp.

9.004.000.000 dan kelompok rendah sebesar Rp. 6.657.000.000. Jika dilihat dari persentase penyebaran dampak tersebut ke masing-masing kelompok pendapatan, kelompok pendapatan tinggi memperoleh persentase dari dampak peningkatan pendapatan yang paling tinggi yaitu sebesar 41 persen, disusul kelompok sedang sebesar 34 persen, dan kelompok rendah sebesar 25 persen.

Tabel 5.7 Dampak Pengeluaran Pemerintah Terhadap Distribusi Pendapatan Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Pada Beberapa Sektor Terpilih (Juta Rupiah)

Peningkat	Sektor	Rendah		Sedang		Tinggi		Total	
		Dampak Income	%						
1	Pemerintahan	1.347	20,2	-	-	7.463	69,4	8.810	33,4
2	Js. Hibrn./Kebudy.	918	13,8	1.338	14,9	407	3,8	2.663	10,1
3	Prswn Bgn/Js.Prshn	440	6,6	1.087	12,1	787	7,3	2.313	8,8
4	Pertanian	618	9,3	1.072	11,9	319	3,0	2.010	7,6
5	Js. Perorangan RT	632	9,5	1.127	12,5	-	0,0	1.759	6,7
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
18	Pertambangan	162	2,4	-	0,0	-	0,0	162	0,6
19	Angkt. Udara	5	0,1	24	0,3	116	1,1	145	0,5
20	Angkt. Laut	97	1,5	48	0,5	-	0,0	145	0,5
21	Komunikasi	27	0,4	26	0,3	36	0,3	88	0,3
22	Js.Angkt./Pergudgan	6	0,1	59	0,7	7	0,1	71	0,3

Sumber: Lampiran 9

Apabila dianalisis per sektor, ternyata pengeluaran pemerintah lebih banyak berdampak pada peningkatan pendapatan di sektor Pemerintahan Umum dan Pertahanan dimana pada sektor ini kelompok pendapatan tinggi yang paling besar persentase peningkatan pendapatannya (69,4 persen). Hal ini dapat dimaklumi karena pengeluaran pemerintah yang cukup besar (34 persen) di sektor ini. Adapun sektor lain yang terkena dampak peningkatan pendapatan yang besar berturut-turut dari yang terbesar adalah sektor Jasa Hiburan dan Kebudayaan, sektor Usaha Persewaan Bangunan dan Jasa Perusahaan, sektor Pertanian, serta sektor Jasa Perorangan dan Rumah Tangga. Sektor Jasa Hiburan dan Kebudayaan serta sektor Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan memiliki dampak pendapatan yang besar akibat pengaruh langsung dari injeksi oleh pengeluaran pemerintah di

kedua sektor ini, sedangkan sektor Pertanian dan sektor Jasa Perorangan dan Rumah Tangga memiliki dampak pendapatan yang besar karena dampak tidak langsung dari meningkatnya permintaan akhir (Tabel 5.7).

Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, pengeluaran pemerintah bidang kebudayaan dan pariwisata untuk sektor pemerintahan (kegiatan administratif) yang cukup besar (34 persen) mengakibatkan dampak langsung yang besar pada peningkatan pendapatan kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi. Hal ini karena pada sektor pemerintahan, komposisi tenaga kerjanya sebagian besar merupakan kelompok berpenghasilan tinggi. Sedangkan dampak pendapatan yang diterima oleh kelompok masyarakat rendah dan sedang merupakan dampak tidak langsung dari peningkatan pengeluaran pemerintah di sektor pemerintahan tersebut, disamping dampak langsung pengeluaran pemerintah di sektor-sektor lainnya selain sektor pemerintahan.

Tabel 5.8 Dampak Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Bagi Kelompok Berpendapatan Rendah Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Pada Beberapa Sektor Terpilih (Juta Rupiah)

Sektor	Kelompok Rendah		Kelompok Sedang		Kelompok Tinggi	
	Dampak Income	%	Dampak Income	%	Dampak Income	%
1 Jasa Hiburan dan Kebudayaan	918	34	1.338	50	407	15
2 Listrik dan Air Bersih	689	100	-	0	-	0
3 Js. Penddkan, Kshtan & Js Sos. Kemasy.	688	100	-	0	-	0
4 Jasa Perorangan dan Rumah Tangga	632	36	1.127	64	-	0
5 Pertanian, Perkebunan, & Peternakan	618	31	1.072	53	319	16
6 Industri Makanan dan Minuman	311	39	490	61	-	0
7 Perikanan	164	30	390	70	-	0
8 Pertambangan dan Penggalian	162	100	-	0	-	0
9 Angkutan Laut	97	67	48	33	-	0
10 Kehutanan	80	20	320	80	-	0
11 Bangunan/Konstruksi	78	9	816	91	-	0

Sumber: Lampiran 9

Sektor Jasa Hiburan dan Kebudayaan, sektor Pertanian, serta sektor Jasa Perorangan dan Rumah Tangga merupakan sektor-sektor yang memberikan dampak pendapatan yang lebih besar bagi kelompok pendapatan rendah dibanding

kelompok pendapatan tinggi (Tabel 5.8). Kebijakan yang tepat untuk mengatasi ketimpangan pendapatan melalui instrumen kebijakan alokasi pengeluaran pemerintah bidang kebudayaan dan pariwisata adalah dengan meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor Jasa Hiburan dan Kebudayaan. Namun pada sekor ini perlu diperhatikan bentuk-bentuk kegiatan dari pengeluaran pemerintah yang lebih memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah sehingga dampak pendapatan yang ditimbulkan bagi masyarakat miskin semakin besar.

### 5.3.2 Analisis Dampak Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Dalam sub bab ini akan dilakukan analisis dampak dari pengeluaran pemerintah bidang pariwisata dan kebudayaan terhadap distribusi penyerapan tenaga kerja pada masing-masing kelompok pendapatan di Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk melihat seberapa besar dampak pengeluaran pemerintah terhadap distribusi tenaga kerja, berikut ini disajikan beberapa tabel analisis beserta uraiannya.

Tabel 5.9 Dampak Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tenaga Kerja Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011

Kelompok Pendapatan	Tenaga Kerja (Orang)			Dampak TK (%)
	Awal	Dampak	Akhir	
Rendah	307.840	5.260	313.100	34
Sedang	514.909	7.728	522.637	49
Tinggi	214.446	2.616	217.062	17
Total	1.037.195	15.604	1.052.800	

Sumber: Lampiran 10

Dari hasil analisis seperti yang terangkum dalam Tabel 5.9, diketahui bahwa pemerintah melalui pengeluarannya di bidang pariwisata dan kebudayaan menyebabkan peningkatan penyerapan tenaga kerja total sebanyak 15.604 tenaga kerja. Pada nilai total tersebut jumlah peningkatan terbesar berada pada kelompok pendapatan sedang yaitu sebesar 7.728 tenaga kerja, selanjutnya kelompok rendah sebesar 5.260 tenaga kerja, dan kelompok tinggi sebesar 2.616 tenaga kerja.

Apabila dilihat dari persentase penyebaran dampak yang diterima oleh tiap-tiap kelompok pendapatan, kelompok pendapatan sedang menerima persentase bagian dampak yang paling tinggi yaitu sebesar 49 persen, selanjutnya kelompok rendah sebesar 34 persen, dan kelompok tinggi sebesar 17 persen.

Tabel 5.10 Dampak Pengeluaran Pemerintah Terhadap Distribusi Tenaga Kerja Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Pada Beberapa Sektor Terpilih (Orang)

Peringkat	Sektor	Rendah		Sedang		Tinggi		Total	
		Dampak TK	%						
1	Js. Hibrn./Kebudy.	4.439	84,38	6.469	83,71	1.968	75,21	12.875	82,51
2	Pertanian	328	6,24	570	7,38	170	6,49	1.068	6,84
3	Perdagangan	50	0,96	133	1,72	169	6,48	353	2,26
4	Js. Kemasyarakatan	193	3,67	-	0,00	-	0,00	193	1,24
5	Pemerintahan	26	0,50	-	0,00	145	5,54	171	1,10
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
18	Pertambangan	11	0,21	-	0,00	-	0,00	11	0,07
19	Bank & Lemb. Keu	1	0,02	4	0,06	3	0,12	8	0,05
20	Komunikasi	2	0,03	2	0,02	2	0,08	5	0,03
21	Restoran	-	0,00	4	0,05	-	0,00	4	0,02
22	Angkt. Udara	0	0,00	0	0,00	1	0,05	2	0,01

Sumber: Lampiran 10

Apabila dilihat lebih rinci pada tiap sektor, ternyata pengeluaran pemerintah lebih banyak menyerap tenaga kerja pada sektor Jasa Hiburan dan Kebudayaan dimana pada sektor ini kelompok pendapatan rendah yang paling besar persentase peningkatan penyerapan tenaga kerjanya (84,38 persen). Hal ini dapat dimaklumi karena pengeluaran pemerintah yang cukup besar (26 persen) di sektor ini dan jenis pengeluarannya yang memang secara langsung berkaitan dengan produksi barang/jasa di sektor ini (dampak langsung). Selain itu, sektor lain yang terkena dampak penyerapan tenaga kerja yang besar berturut-turut dari yang terbesar adalah sektor Pertanian, sektor Perdagangan, sektor Jasa Kemasyarakatan, serta sektor Pemerintahan Umum dan Pertahanan. Sektor Pemerintahan Umum dan Pertahanan walaupun memiliki alokasi pengeluaran pemerintah yang paling besar (34 persen) tetapi hanya mampu menciptakan penyerapan tenaga kerja yang tidak terlalu besar di sektor ini (Tabel 5.10).

Kemungkinan hal ini diakibatkan oleh jenis pengeluaran pemerintah yang lebih banyak terkait dengan produksi barang/jasa di sektor lain daripada dengan sektor Pemerintahan itu sendiri atau memiliki dampak langsung yang kecil. Selanjutnya, sektor Pertanian, sektor Perdagangan, dan sektor Jasa Kemasyarakatan memiliki dampak tenaga kerja yang besar karena struktur ketenagakerjaan di Sulawesi Tengah dikuasai oleh tiga sektor ini, sehingga dampak yang ditimbulkan oleh pengeluaran pemerintah di tiga sektor ini merupakan dampak tidak langsung dari injeksi tersebut.

Sektor-sektor yang memiliki dampak tenaga kerja yang kecil berturut-turut dari yang terendah adalah sektor Angkutan Udara, sektor Restoran, sektor Komunikasi, sektor Bank dan Lembaga Keuangan, serta sektor Pertambangan dan Penggalan.

Tabel 5.11 Dampak Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kesempatan Kerja Bagi Kelompok Berpendapatan Rendah Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Pada Beberapa Sektor Terpilih (Orang)

Sektor		Kelompok Rendah		Kelompok Sedang		Kelompok Tinggi	
		Dampak TK	%	Dampak TK	%	Dampak TK	%
1	Jasa Hiburan dan Kebudayaan	4.439	34	6.469	50	1.968	15
2	Pertanian, Perkebunan & Peternakan	328	31	570	53	170	16
3	Js. Pendedkan, Kshtan & Js. Sos. Kemasy.	193	100	-	0	-	0
4	Jasa Perorangan dan Rumah Tangga	44	36	78	64	-	0
5	Perikanan	38	30	90	70	-	0
6	Industri Makanan dan Minuman	22	39	35	61	-	0
7	Listrik dan Air Bersih	21	100	-	0	-	0
8	Kehutanan	16	20	63	80	-	0
9	Pertambangan dan Penggalan	11	100	-	0	-	0
10	Angkutan Laut	10	67	5	33	-	0
11	Bangunan/Konstruksi	3	9	36	91	-	0

Sumber: Lampiran 10

Sektor Jasa Hiburan dan Kebudayaan merupakan sektor yang memberikan bagian dampak tenaga kerja yang besar bagi kelompok pendapatan rendah dibanding kelompok pendapatan tinggi (Tabel 5.11). Kebijakan yang tepat untuk mengatasi ketimpangan distribusi kesempatan kerja adalah dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah bidang kebudayaan dan pariwisata di sektor Jasa Hiburan

dan Kebudayaan namun harus tetap memperhatikan jenis kegiatan yang dapat lebih memberdayakan kelompok pendapatan rendah.

Jika melihat dari dampak pengeluaran pemerintah bidang kebudayaan dan pariwisata di Sulawesi Tengah baik terhadap distribusi pendapatan maupun distribusi penyerapan tenaga kerja, terdapat ketimpangan pendapatan rumah tangga di sektor-sektor yang melibatkan kegiatan-kegiatan pariwisata. Ketimpangan tersebut terindikasi dari besarnya dampak pendapatan yang diterima oleh kelompok pendapatan tinggi padahal kelompok pendapatan tinggi ini hanya menyerap jumlah tenaga kerja yang lebih sedikit dibandingkan dengan kelompok pendapatan rendah dan sedang.

Program-program unggulan di bidang pariwisata seperti telah disebutkan pada bab sebelumnya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Sulawesi Tengah masih belum banyak melibatkan peran serta kelompok ekonomi rendah. Jika dilihat lebih rinci pada kegiatan-kegiatannya, komponen pembiayaan yang bersifat administratif dan rutin masih mendominasi dalam pengeluaran di seluruh program-program tersebut, padahal pengeluaran yang sifatnya administratif ini hanya akan memberikan dampak pendapatan bagi kelompok rumah tangga berpendapatan tinggi. Sebanyak 34 persen dari total anggaran bidang kebudayaan dan pariwisata di Sulawesi Tengah diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan yang bersifat administratif.

Hal lain yang menyebabkan tingginya ketimpangan adalah kurangnya pemberdayaan masyarakat pada setiap kegiatan dari program unggulan pariwisata yang seharusnya bisa melibatkan masyarakat/rumah tangga secara langsung. Hal ini terindikasi dari masih tingginya pengeluaran pemerintah bidang kebudayaan dan pariwisata yang diperuntukkan bagi penggunaan jasa perusahaan. Sebanyak 19 persen dari total alokasi pengeluaran pemerintah bidang kebudayaan dan pariwisata digunakan untuk mengkonsumsi output sektor jasa perusahaan.

#### **5.4 Simulasi Kebijakan**

Dalam rangka memaksimalkan dampak pengeluaran pemerintah di bidang pariwisata dan kebudayaan di Sulawesi Tengah, agar sesuai dengan tujuan khusus

yang ingin dicapai dari kebijakan tersebut, maka pemerintah dapat melakukan berbagai skenario kebijakan. Untuk mengetahui dampak dari berbagai skenario kebijakan yang akan digunakan, dapat dilakukan melalui simulasi kebijakan.

Pengertian simulasi kebijakan dalam penelitian ini adalah berbagai kemungkinan skenario penggunaan pengeluaran pemerintah bidang pariwisata dan kebudayaan di Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam penulisan ini, asumsi yang digunakan dalam menyusun skenario kebijakan tersebut adalah:

1. Jumlah total pengeluaran pemerintah yang akan diinjeksi ke berbagai sektor adalah sebesar Rp. 46.252.690.000 atau sesuai dengan perkiraan jumlah pengeluaran pemerintah bidang pariwisata dan kebudayaan pada tahun 2011.
2. Jumlah sektor yang diinjeksi oleh pengeluaran pemerintah sesuai dengan jumlah sektor yang diinjeksi berdasarkan Renstra Dinas Budpar 2006-2011.
3. Masing-masing sektor menerima alokasi pengeluaran pemerintah tidak lebih dari 50 persen total pengeluaran pemerintah bidang pariwisata dan kebudayaan.

Berdasarkan asumsi-asumsi di atas, sektor-sektor yang akan diinjeksi oleh pengeluaran pemerintah dalam simulasi kebijakan ini adalah sektor Bangunan/Konstruksi, sektor Restoran, sektor Hotel, sektor Usaha Persewaan Bangunan dan Jasa Perusahaan, sektor Pemerintahan umum dan Pertahanan, serta sektor Jasa Hiburan dan Kebudayaan. Adapun skenario-skenario kebijakan yang dibuat dalam penelitian ini adalah:

1. Skenario I (Merata): Pengeluaran pemerintah dialokasikan secara merata ke enam sektor tersebut, sehingga masing-masing sektor diinjeksi sebesar 16,7 persen dari total pengeluaran pemerintah.
2. Skenario II (Bangunan): Alokasi untuk sektor Bangunan/Konstruksi ditingkatkan sebesar 40 persen dari nilai semula (sesuai Renstra), sedangkan alokasi sektor lainnya dikurangi dengan porsi jumlah yang sama.

3. Skenario III (Restoran): Alokasi untuk sektor Restoran ditingkatkan sebesar 40 persen dari nilai semula, sedangkan alokasi sektor lainnya dikurangi dengan porsi jumlah yang sama.
4. Skenario IV (Hotel): Alokasi untuk sektor Hotel ditingkatkan sebesar 40 persen dari nilai semula, sedangkan alokasi sektor lainnya dikurangi dengan porsi jumlah yang sama.
5. Skenario V (Jasa Perusahaan): Alokasi untuk sektor Usaha Persewaan Bangunan dan Jasa Perusahaan ditingkatkan sebesar 40 persen dari nilai semula, sedangkan alokasi sektor lainnya dikurangi dengan porsi jumlah yang sama.
6. Skenario VI (Pemerintahan): Alokasi untuk sektor Pemerintahan Umum dan Pertahanan ditingkatkan sebesar 40 persen dari nilai semula, sedangkan alokasi sektor lainnya dikurangi dengan porsi jumlah yang sama.
7. Skenario VII (Jasa Hiburan): Alokasi untuk sektor Jasa Hiburan dan Kebudayaan ditingkatkan sebesar 40 persen dari nilai semula, sedangkan alokasi sektor lainnya dikurangi dengan porsi jumlah yang sama.

Tabel 5.12 Skenario Kebijakan Alokasi Pengeluaran Pemerintah Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 (Juta Rupiah)

Skenario	Alokasi Pengeluaran Pemerintah												Total
	Sektor 8		Sektor 10		Sektor 11		Sektor 18		Sektor 19		Sektor 21		
	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	
Renstra	6.938	15	1.388	3	1.388	3	8.788	19	15.726	34	12.026	26	<b>46.253</b>
I (Merata)	7.709	17	7.709	17	7.709	17	7.709	17	7.709	17	7.709	17	<b>46.253</b>
II (Bangunan)	9.713	21	833	2	833	2	8.233	18	15.171	33	11.471	25	<b>46.253</b>
III (Restoran)	6.827	15	1.943	4	1.277	3	8.677	19	15.615	34	11.915	26	<b>46.253</b>
IV (Hotel)	6.827	15	1.277	3	1.943	4	8.677	19	15.615	34	11.915	26	<b>46.253</b>
V (Js. Pershn)	6.235	13	685	1	685	1	12.303	27	15.023	32	11.323	24	<b>46.253</b>
VI (Pemerintahan)	5.680	12	130	0.3	130	0.3	7.530	16	22.016	48	10.768	23	<b>46.253</b>
VII (Js. Hiburan)	5.976	13	426	1	426	1	7.826	17	14.764	32	16.836	36	<b>46.253</b>

Peningkatan alokasi pada masing-masing sektor sebesar 40 persen didasarkan pada asumsi bahwa nilai peningkatan ini merupakan nilai peningkatan maksimum yang tidak menyebabkan alokasi pada sektor tersebut melebihi 50 persen dari total alokasi pengeluaran pemerintah. Gambaran mengenai skenario-skenario kebijakan ini dapat dilihat seperti pada Tabel 5.12.

Berdasarkan skenario-skenario yang telah ditetapkan seperti terlihat pada Tabel 5.12, kemudian dilakukan simulasi dengan menginjeksi pengeluaran pemerintah ke dalam sektor-sektor tersebut. Sebagai pembanding, digunakan pula skenario alokasi pengeluaran pemerintah berdasarkan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Sulawesi Tengah. Dari hasil simulasi diperoleh gambaran mengenai dampak terhadap distribusi pendapatan dari berbagai skenario yang telah dilakukan seperti terlihat pada Tabel 5.13.

Tabel 5.13 Hasil Simulasi Dampak Pengeluaran Pemerintah Terhadap Distribusi Pendapatan Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 (Juta Rupiah)

Skenario	Dampak Income						
	Kelompok Rendah		Kelompok Sedang		Kelompok Tinggi		Total
	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai
Renstra	6.657	25	9.004	34	10.752	41	26.414
I (Merata)	6.343	24	10.433	39	9.723	37	26.499
II (Bangunan)	7.427	22	10.365	31	15.507	47	33.299
III (Restoran)	7.453	22	9.894	30	15.883	48	33.231
IV (Hotel)	7.522	23	9.900	30	15.948	48	33.370
V (Jasa Perusahaan)	7.185	22	9.501	30	15.417	48	32.104
VI (Pemerintahan)	8.349	21	9.678	25	21.062	54	39.089
VII (Jasa Hiburan)	7.618	23	9.784	30	15.175	47	32.578

Sumber: Lampiran 9 dan 11

Berdasarkan hasil simulasi kebijakan untuk melihat dampak terhadap distribusi pendapatan, diperoleh hasil bahwa skenario VI (Pemerintahan) memberikan dampak pendapatan total yang paling besar. Namun, skenario ini justru semakin meningkatkan ketimpangan pendapatan karena kelompok pendapatan tinggi menerima dampak pendapatan yang jauh lebih besar dibanding kelompok pendapatan lainnya.

Skenario yang lebih moderat, yaitu skenario yang dapat mengakomodasi tujuan penciptaan total pendapatan yang besar dan dampak terhadap distribusi pendapatan yang relatif lebih baik adalah skenario VII (Jasa Hiburan). Masih rendahnya bagian dampak yang diterima oleh kelompok pendapatan rendah pada skenario VII (Jasa Hiburan) ini dapat diperbaiki pada tahap implementasi pelaksanaan kegiatan-kegiatannya yang lebih memberdayakan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah daripada menggunakan jasa perusahaan.

Selain itu, gambaran mengenai dampak yang terjadi pada distribusi tenaga kerja akibat pengeluaran pemerintah berdasarkan hasil simulasi dapat dilihat pada Tabel 5.14.

Tabel 5.14 Hasil Simulasi Dampak Pengeluaran Pemerintah Terhadap Distribusi Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 (Orang)

Skenario	Dampak Tenaga Kerja						
	Kelompok Rendah		Kelompok Sedang		Kelompok Tinggi		Total
	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai
Renstra	5.260	34	7.728	50	2.616	17	15.604
I (Merata)	2.735	32	4.192	50	1.538	18	8.465
II (Bangunan)	3.672	33	5.495	49	2.025	18	11.192
III (Restoran)	3.784	33	5.637	49	2.082	18	11.503
IV (Hotel)	3.787	33	5.639	49	2.089	18	11.515
V (Jasa Perusahaan)	3.600	33	5.360	49	1.989	18	10.950
VI (Pemerintahan)	3.579	33	5.311	48	2.090	19	10.979
VII (Jasa Hiburan)	4.962	33	7.313	49	2.574	17	14.849

Sumber: Lampiran 10 dan 12

Berdasarkan hasil simulasi kebijakan pada skenario-skenario yang telah dibuat sebelumnya, diperoleh hasil bahwa skenario alokasi pengeluaran pemerintah pada sektor-sektor ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Renstra Disbudpar 2011 memberikan hasil yang terbaik ditinjau dari banyaknya dampak penyerapan tenaga kerja secara keseluruhan yang dihasilkan oleh skenario ini. Selain itu distribusi penyerapan tenaga kerja yang dihasilkan oleh skenario ini lebih memberikan gambaran yang baik bagi pemerataan kesempatan kerja dimana dampaknya lebih banyak menciptakan penyerapan tenaga kerja bagi kelompok pendapatan rendah dibanding kelompok pendapatan tinggi.